

MEMBINA HARMONISASI KEHIDUPAN ANTAR ETNIS DI PROVINSI GORONTALO

**Oleh : Roni Lukum,S.Pd.M.Sc
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo**

A b s t r a c t

Inter – ethnic life in the province of Gorontalo to the current inter-ethnic relation are very harmonious. This condition is created thanks to mutual awereness between local government with local communities, where all have the same rights as ethnic fill development in areas within the province of Gorontalo. This we can see in the role of non-indigenous ethnic Gorontalo Province in trading activities in the province of Gorontalo. The local government treated the same as the original inhabitants of the ethnic if others want to trade in the region. For the people of Gorontalo realize , that with the economics actors who come from ethnic Chinese and Arabic will increase economic growth in the regions of Gorontalo.

Life like this is also supported by the consciosness of ethnic immigrants who have commited ethnic assimilation with the native inhabitants of Gorontalo, so they do not get trouble in conducting commerce in the area, but potential conflict may occur, if the population of ethnic immigrants do not want mingle with society Gorontalo.

Keywords : Ethnicity, Harmony, Autonomy, Political

Pendahuluan

Dalam memahami kehidupan antar etnis alangkah baiknya kita harus memahami dulu pengertian etnis di dalam pendekatan keilmuan. Banyak orang menyepelekan pengertian-pengertian kalimat ini, sehingga tidak paham terhadap pengertian kata etnik tersebut. Bila mengutip berbagai pendapat tentang etnis ada beberapa pengertian etnis diantaranya sebagaimana yang dikutip di bawah ini. Pengertian etnisitas adalah suatu istilah yang dinyatakan pada sekelompok orang disebabkan oleh karena memiliki keterikatan persamaan keturunan yang sama, persamaan bahasa, persamaan sejarah yang sama.

Penjelasan di atas dapat dilihat dari istilah etnisitas yang berasal dari kata Istilah etnic atau yang diterjemahkan ke dalam istilah suku bangsa, berasal dari kata Yunani *eovikos* yang artinya *heathen* atau penyembah berhala atau orang yang tidak ber-Tuhan. Dalam bahasa Yunani, istilah itu sendiri berasal dari akar kata *eovos* (ethos) yang diterjemahkan sebagai *nation* atau bangsa yaitu suatu istilah yang lazim dipakai untuk menunjuk pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dengan kata lain menurut *The shorter Oxpord English Dictionary on historical Principles*, ada dua

pengertian yang terkandung dalam istilah etnik ialah (a) menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang non Kristen atau non Yahudi, dan (b) menunjuk kepada bangsa yang masih menyembah berhala.

Dalam *Dictionary of sociology* dari G. Duncan Mitchell's (Chicago, Aldine, 1968) tidak ditemukan entri kata *ethnic groups* maupun *ethnicity*, bahkan juga tidak ditemukan pembatasan arti dalam entri kata *ethnocentrism* demikian pula halnya dalam *Handbook of Sociology* yang terbit pada 1941 yang diedit oleh Edward Byron Reuter (New York, Dryden Press); serta dalam *Modern Dictionary of Sociology* dan George A. dan Achilles G. *The Odorsson* (New York, Thomas Y. Crowell, 1969) tidak ditemukan entri kata *ethnic group* tetapi ada entri kata *sub group* yang pengertiannya agak mendekati arti kata *ethnic group* yang didefinisikan sebagai "a group with a common cultural tradition and a sense of identity which exists as a subgroup of larger society". Dalam konteks tersebut George dan Achilles tidak menganjurkan bahwa ruang lingkup istilah *ethnic group* dapat diterapkan bagi suatu kelompok yang memiliki perbedaan asal usul dan tradisi kebudayaan, sekalipun kelompok tersebut merupakan mayoritas dalam suatu negara. Oleh karenanya, seperti dalam konteks orang Amerika dimasa lalu (*old Americans*) yang merupakan keturunan *Anglo-Saxons*, dapat dianggap sebagai *ethnic groups*.

Etnisitas atau *ethnicity* juga merupakan istilah yang relatif baru. Konotasi arti yang terkandung dalam istilah tersebut lebih dipergunakan untuk menunjuk kandungan sifat-sifat atau kualitas kesuku-bangsaan, karenanya etnisitas dapat pula diartikan sebagai "kesuku-bangsaan". Dalam *oxford English Dictionary* yang terbit pada 1972. disana dijelaskan bahwa yang pertama kali memakainya adalah David Riesman pada tahun 1953 dalam *webstair's New English Dictionary International jilid III* yang terbit pada tahun 1961.

Pada hakekatnya, berbagai konsepsi *ethnic-group* atau suku bangsa yang selama ini ada, lebih berpangkal dari konsep budaya (Knutsson, 1970:98), karenanya keaneka ragam suku-bangsa juga tergantung bagaimana dari sudut manakah kebudayaan didefinisikan. Semakin beraneka warnanya suku bangsa disuatu negara, maka semakin banyak terdapat variasi perbedaan kebudayaan. Karena jika hanya mendasarkan konsepsi hukum bangsa semata, kiranya tidak cukup dipakai untuk menganalisis etnisitas. berbagai perbedaan yang ada, tidak selalu dapat dianggap etnisitas sepanjang diantara mereka terjadi efektivitas relasi yang mencerminkan suatu tinggi rendahnya level integrasi sosial. Dengan kata lain, bahwa fenomena utama dari masalah etnisitas yang dianggap sebagai masalah kesuku-bangsaan apabila interalasi mereka cukup rendah. Karena itulah Epstein (1973 : 93) cenderung menilai bahwa etnisitas adalah lebih merupakan fenomena politik.

Studi etnisitas penting bagi suatu Negara plural, agar keanekaragaman suku bangsa dapat dikembangkan sebagai strategi nasional kearah terwujudnya integrasi nasional. Nasionalisme yang dikembangkan tentunya membutuhkan adanya saling pengakuan loyalitas dan solidaritas diantara kebudayaan yang berbeda.

Untuk menuju bagian dari masyarakat yang lebih luas, misalnya sebagai satu *nation state*, pada dasarnya ada tiga masalah pokok yang dibahas dalam etnisitas.

Pertama, garis pembatas dimasa lalu, misalnya relegi, bahasa dan afiliasi politik, yang masih potensial bagi munculnya konflik. *Kedua*, apa dan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk konflik baru dikalangan mereka, termasuk konflik diantara suku-bangsa mayoritas dan minoritas. Apakah mereka saling bertikai disebabkan oleh kebutuhan akan penghargaan (*prestige*), kehormatan (*respect*), hak-hak civil (civil rights), kekuasaan politik (*political power*), ataukah akses terhadap perekonomian (*access to economic opportunity*). *ketiga*, studi tentang etnisitas tidak hanya sekedar dikaitkan dengan masalah mengejar sesuatu kesempatan semata, melainkan juga berkaitan dengan suatu ideologi dan kepentingan tertentu. Karenanya kehadiran suatu etnisitas merupakan pula cerminan revitalisme identitas suatu suku bangsa yang sering disebut pula sebagai *primordialism*". Identitas yang mendasar suku-bangsa tadi oleh C. Geertz disebut dengan "*primordial affinities and attachments*" yang dimiliki seseorang sejak lahir atau dimiliki karena kelahirannya (ascribed), seperti kesamaan hubungan kekerabatan dan pertalian darah, kelahiran bahasa, dan merupakan *candi-date for nationhood*".

Otonomi Daerah Dan Konflik Horizontal Tantangan bagi Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Otonomi daerah sering menimbulkan permasalahan di daerah-daerah di Indonesia sebagaimana konflik yang terjadi pada saat-saat momentum pelaksanaan pilkada secara langsung akibat dari penerapan otonomi daerah. Menurut Paulus (2005 : 169) Integrasi nasional suatu bangsa pada dasarnya membutuhkan secara seimbang tiga kekuatan pengikat yaitu : *Pertama*, Adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar, ideologi dan cita-cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (integrasi normatif). *Kedua*, Adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat nasional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap-tiap daerah dengan terintegrasi dalam suatu Negara kesatuan (integrasi Fungsional). *Ketiga*, Adanya kekuatan yang berwujud dari pemerintah pusat untuk menjaga komitmen tiap-tiap daerah untuk berintegrasi sehingga tercipta suatu kestabilan dan keteraturan (integrasi koersif).

Tiga kekuatan di atas dapat dijelaskan tanpa adanya keseimbangan dari ketiga unsur di atas, integrasi nasional tidak akan tercipta secara baik dan serasi. Pada masa orde baru, misalnya integrasi nasional terjadi secara semu, kerana terlalu didominasi oleh unsur *koersif* dari pemerintahan melalui pendekatan "*security approach*" (dengan mengandalkan kekuatan militer). Integrasi normatif yang ditanamkan melalui Pancasila juga terasa amat dipaksakan (doktriner) sehingga gagal menanamkan kesepakatan nilai secara nyata. Masyarakat Indonesia hanya seolah-olah terintegrasi padahal terjadi banyak "*hidden conflict*" diantara berbagai golongan maupun daerah. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah dan golongan juga telah membuat masyarakat berbagai daerah kehilangan fungsi dari integrasi sehingga terjadi banyak keinginan untuk meninggalkan ide negara kesatuan.

Terlalu lemahnya integrasi koersif juga cenderung melemahkan kewibawaan pusat, sehingga bisa menjurus pada tindakan-tindakan daerah yang anarkis. Semua kecenderungan itu bila dilihat secara nasional merugikan kita sebagai negara bangsa, tetapi banyak masyarakatan hanya melihatnya dari sudut kepentingan daerahnya masing-masing. Kedua sudut pandang ini saling tarik menarik, menimbulkan banyak potensi konflik baik vertikal (antara masyarakat dan pemerintah, antara pemerintah lokal dengan pemerintah pusat maupun horizontal (antar masyarakat dan antar daerah). Dengan kata lain, bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis "keserasian sosial".

Tantangan kita adalah menyeimbangkan tiga "pilar tersebut". Pendekatan-pendekatan yang terlalu radikal dan berat sebelah (walaupun nampaknya bersifat reformis) belum tentu akan menyelematkan kita, misalnya mengambil sistem federasi, memberi kebebasan sebesar-besarnya pada rakyat dan menekan serendah mungkin kewibawaan pemerintah dan sebagainya. Misalnya bila pers dengan kebebasannya boleh membeberkan terjadinya konflik horizontal antar etnik atau agama disuatu daerah tertentu secara amat eksplisit dan provokatif, maka ini akan menyebabkan rakyat daerah lain yang tidak punya masalah ikut terprovokasi.

Merebaknya "violence conflict" diberbagai daerah sebenarnya lebih banyak merupakan "mode" yang dikembangkan oleh media masa. Cara-cara konflik kekerasan disuatu tempat merupakan inspirasi bagi kelompok di tempat lain. Ekspose di televisi sering justru amat membagikan bagi kelompok yang berkonflik, apalagi bila mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibanggakan (terutama ditengah-tengah kaum miskin pengangguran dan sebagainya). Bila kita ingin melakukan reformasi dengan cara-cara radikal (transformasi total) tanpa konsep yang jelas dan kesabaran maka kita justru bisa menuai *deformasi* (kerusakan bentuk).

Multikulturalisme Dalam Politik Lokal.

Dalam setiap persoalan bangsa ini, bisa saja ambruk oleh karena negara tidak mampu melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan konflik di dalam negaranya, karena kebijakan yang tidak didasarkan pada kebutuhan daerah dan etnis yang ada di daerah tersebut. Gejala seperti ini bisa saja negara tidak melihat multikulturalisme yang berkembang dan tumbuh di daerah.

Multikulturalisme dalam sepuluh tahun terakhir sedang mengalami gelombang pasang. Ia tidak hanya muncul dalam diskursus kalangan kaum liberal di Barat, namun juga sudah digunakan sebagai solusi terbaik pemecahan masalah konflik antar etnis di kawasan dinegara-negara Eropa Timur.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Savirani (2006:385) ide multikulturalisme pada dasarnya adalah gagasan mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan dengan keragaman itu sendiri (*politics of recognition*). Dalam bukunya (Taylor, 1994). Lebih jauh lagi, gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran yang sedang menjadi diskusi hangat. Sementara di Indonesia misalnya, diskursus ide ini

sejauh ini berkaitan dengan penghargaan eksistensi masyarakat dapat, meski terselip juga didalamnya stabilisasi pengakuan terhadap kelompok minoritas baik dari sisi etnis maupun kepercayaan.

Hongaria, salah satu negara yang terletak di Eropa Tengah saat ini juga sedang bergulat mengurus pluralisme di negaranya khusus menyangkut perlindungan kelompok minoritas. Badai konflik antar etnis di Negara ini memang tidak segaduh yang berlangsung di bekas Yugoslavia dan relatif mudah diamati. Kondisi ini bisa menjelaskan kenapa negara ini termasuk yang paling depan agresivitasnya dalam mengadopsi gagasan multikulturalisme.

Gelombang pasang diskusi multikulturalisme sebagai ide tak bisa dilepaskan dari keterbatasan teoritisasi demokrasi yang saat ini ada, menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok etnis-kultural (Kymlika : 16). Teoritisasi liberal lahir disebuah masyarakat dengan derajat *homogenitas* yang relatif tinggi. Dalam konteks ini, peluang bekerjanya dua prinsip liberal yakni hak-hak individu dan hak-hak politik relatif mudah dilakukan. Dalam arena relasi antar etnis, upaya menegakkannya kedua prinsip liberal amat sulit karena basis asumsi soal *homogenitas* yang tidak dapat ditemukan.

Dalam kondisi kontemporer inilah, gagasan multikulturalisme digunakan oleh banyak kalangan. Multikulturalisme sesungguhnya merupakan salah satu dari sebagian alternatif pemikiran dalam mengelola keberagaman. Alternatif lain yang tersedia adalah otonomi teritorial dan *non territorial power sharing* atau yang lebih dikenal sebagai demokrasi konsensual. Inti gagasan yang terakhir ini adalah representasi politik berdasarkan keberadaan kelompok yang ada disebuah masyarakat. Gagasan yang dikenal sebagai *power sharing* ini lebih jauh lagi mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut *pertama*, ide proporsionalitas, *kedua*, koalisi besar dikabinet, *ketiga*, pemilikan hak veto dan *keempat*, pemberian otonomi pada kelompok minoritas, misalnya pemberian hak pemerintahan sendiri. (Iijpart, 1995).

Kelahiran gagasan multikulturalisme dan komitmen terhadap keberagaman secara general, perlu dilihat dalam dialektiknya terhadap gagasan monokulturalisme. Multikulturalisme merupakan respon atas dan kritik terhadap monokulturalisme yang mendominasi wacana ilmu sosial diparuh pertama abad ke-20. Namun begitu kritisisme terhadap monokulturalisme memiliki banyak bentuk juga, terentang dari pengakuan terhadap berbagai jenis kultur dan konsepsi normatif yang mengiringinya, sampai pada semua ide yang data masuk dalam kategori sebagai yang secara moral benar (*politically correctness*) (Goldberg, 1994 :7). Lebih jauh lagi, McLaren membedakan jenis-jenis komitmen terhadap multikulturalisme ini yakni konservatif, kiri-liberal dan kritikal (Goldberg, 1994:7). Di ujung paling ekstrim, ada yang disebut sebagai multikulturalisme koporasi. (*cooperate multicultralim*), yakni ide-ide multikulturalime yang dianut dikalangan akademisi dan perusahaan-perusahaan multinasional yang konon memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip besar liberalime, sebatas ide normatif, dan pada saat yang sama tidak dihiraukan akan

pentingnya redistribusi kekuasaan dan sumber material, yang sama pentingnya dan perlu mengiringi komitmen normatif tersebut.

Pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik hubungan antar etnis di kawasan Eropa Tengah dan Timur berbeda sama sekali dengan kondisi di tanah air. Upaya pengakuan terhadap eksistensi kelompok minoritas lewat ide multikulturalisme pertama-tama menyangkut hak menggunakan bahasa ibu bagi masing-masing kelompok kedua, upaya institusionalisasi ide multikulturalisme ini tidak mudah. Disamping kebutuhan perangkat hukum dan infrastruktur pengaturan teknis yang amat rumit, ide ini memiliki nilai politis yang sangat kuat yakni sebagai syarat bagi integral Uni Eropa dan kepentingan material jangka pendek yakni upaya menarik *support* lembaga donor sejenis *Open Society Institute* (OSI) untuk mendukung *institutional building* ide multikulturalisme. Lebih jauh lagi adalah pertanyaan, sejauh mana hak-hak kelompok minoritas ini dapat dieksekusi dikaitkan dengan eksistensi *nation state* disisi lain. Apakah ide liberal ini akan mentoleransi kemungkinan praktek liberal oleh kelompok minoritas itu terhadap komunitasnya.

Lepas dari pandangan kritis diskursus ide ini dilevel akademik dan rumitnya pengejawantahan gagasan ini di level praktis, mulai tampaknya raut keterbatasan teoritisasi liberal tentang pengelolaan pluralitas dapat terus menjadi remantik bagi keberlangsungan diskusi ini ke depan.

Fenomena Etnosentrisme dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Sejak pemberlakuan UU.No.22 Tahun 1999, UU.No.32 tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 memunculkan perilaku menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya justru telah memunculkan ide untuk menghapus rasa nasionalisme antar warga setempat, karena pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat lokal mulai memunculkan ide etnosentrisme.

Fenomena lain adalah munculnya banyak tuntutan orang daerah untuk memekarkan daerah yang selama tiga dasawarsa era pemerintahan Orde Baru sangat tabu dilakukan. Momentum reformasi rupanya dimanfaatkan oleh mereka yang mendesak pembentukan daerah otonom sendiri dengan karakteristik "*ethnic group-nya* atau tidak bercampur dengan etnik lain. Aji mumpung berlaku disini.

Fenomena etnosentrisme mulai berkembang sejak awal tahun 2000 waktu pemilihan kepala daerah/wakil kepala Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.22 tahun 1999 mulai diterapkan. Masyarakat daerah setempat ramai-ramai menuntut calon Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta para wakilnya berasal dari PAD (putra asli Daerah). PAD pada era otonomi daerah bukan lagi akronim dari pendapatan Asli daerah.

Menguatnya aspirasi pejabat dan PNS dari PAD berakar dari trauma yang disebabkan oleh praktek kepegawaian masa lalu. orang-orang daerah setempat sakit hati banyak melihat yang memegang posisi kunci justru berasal dari daerah lain diluar daerah tersebut. Sementara dalam penerimaan pegawai, orang-orang pendatang pula

yang banyak lulus test. Rasa diperlakukan tidak adil itulah yang kayaknya orang daerah tidak menerima daerah lain untuk menduduki jabatan dan PNS di daerahnya.

Belakangan pula muncul wabah etnosentrisme melanda pula wilayah lembaga legislatif daerah kita. Mulai terdengar suara agar DPRD dipimpin dan diisi oleh anggota-anggota dari kalangan PAD. Mereka yang bukan berasal dari PAD harus dihindarkan dari daerah itu. Walaupun suara itu belum cukup kencang, tetapi kalau dicermati asal usulnya terlihat berawal dari rasa frustrasi masyarakat daerah setempat yang calonnya dari kalangan PAD tidak golongan menjadi KDH, karena lemahnya dukungan anggota Dewan. Maka guna memerangi pemilihan KDH, jumlah anggota DPRD dari PAD harus dilipat gandakan. Fraksi laten yang namanya “Fraksi PAD” mesti didirikan. Budaya etnosentrisme sebetulnya menghambat rasa nasionalisme kita, oleh karenanya kalau hal ini menjadi landasan pemerintah daerah sebagai kebijakan untuk menempatkan seseorang pada posisi jabatan struktural maupun jabatan politik, dan apa lagi pada persoalan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang santer diperebutkan dan menjadi kompetisi adalah PNS kalau semua dilakukan berdasarkan pola etnosentrisme. Hal ini akan menjadi persoalan dan akan bermuara pada konflik kepentingan di daerah.

Hasil penelitian

Jumlah sebaran etnis di Provinsi Gorontalo.

Penduduk Propinsi Gorontalo terdiri dari beberapa etnik yang hidup berdampingan satu sama lain. Bila dilihat dari penduduk asli Gorontalo ada beberapa etnik yang tersebar di beberapa daerah. Kita ketahui bahwa di propinsi Gorontalo yang terdiri dari 6 kabupaten yang baru dimekarkan diantaranya kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten BoneBolango dan kabupaten Gorontalo Utara. Dari enam kabupaten ini maka tersebarlah beberapa etnik yang ada, namun ada di beberapa daerah Gorontalo pemukiman etnik tertentu, misalnya etnik China menempati satu perkampungan yang sekarang ini dinamakan dengan kampung China yang terdapat di wilayah kota Gorontalo, demikian dengan etnis arab dengan sebutan kampung Arab berada kota Gorontalo.

Penjelasan di atas, terlihat bahwa penduduk Provinsi Gorontalo terlihat jelas bahwa keaneka ragaman suku atau etnik harus menjadi perhatian pemerintah daerah, karena miniatur Indonesia dapat dilihat di propinsi Gorontalo. Dengan demikian konsep pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah harus menggunakan konsep wawasan Nusantara, sehingga pada saat melaksanakan program pembangunan pemerintah daerah dapat mengedepankan asas keadilan kepada seluruh warganya.

Bahwa Propinsi Gorontalo dengan penduduk pada saat sensus pada tahun 2000 sejumlah 829.948 yang terdiri dari beberapa etnik yang ada, dimana etnik mayoritas adalah penduduk asli, selanjutnya yang menjadi terbesar kedua adalah etnik lainnya, saya meramalkan bahwa yang dimaksud dengan etnik lainnya itu adalah penduduk Gorontalo yang berasal dari luar etnik Indonesia tetapi telah menjadi warga Negara Indonesia yang sebarannya 4,14% dari penduduk Gorontalo. Namun penduduk etnik inilah yang menguasai perekonomian daerah Gorontalo dibidang perdagangan, selanjutnya etnik terbesar ketiga adalah etnik Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 20.427 atau 2,46%, penduduk ini diprovinsi Gorontalo memiliki satu lokalisasi dengan penduduk yang telah berbaur dengan etnik asli dan kehidupannya terterima dengan baik didaerah itu. Bahkan budaya masyarakat Jawa yang ada dikabupaten Gorontalo kebudayaannya telah menjadi tradisi di beberapa kecamatan yang ada didaerah Gorontalo, seperti perayaan Katupat yang dilaksanakan tujuh hari setelah perayaan hari raya idul fitri. Kegiatan ini mendapat dukungan masyarakat setempat. Selanjutnya etnik Sangir yang penduduknya sebagai urutan keempat penduduk propinsi Gorontalo berjumlah 5.999 atau 0,72% etnik sangir pun kehidupannya didaerah Gorontalo telah berbaur dengan penduduk asli. Bahkan gambaran pembauran itu dapat dilihat dari masyarakat asli ada yang telah berkeluarga dengan etnik sangir. Dan terbesar kelima adalah etnik Atinggola yang menurut saya ini masih dalam kategori etnik Gorontalo namun dibedakan dengan bahasa yang dipakai, yang dimaksudkan dialegnya berbeda dengan bahasa Gorontalo, jumlah mereka sesuai data adalah 4.681 atau 0,56%.

Data di atas, penulis hanya memberikan gambaran bahwa masyarakat Gorontalo sebaran penduduknya sebagai miniatur Indonesia karena penduduknya \pm 10% penduduk pendatang. Etnik pendatang ini diperlakukan oleh pemerintah daerah dengan tidak melihat etnis begitupun dengan masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat, ketika pencalonan Bupati Kabupaten Pohuwato, dimana calon yang disandingkan salah satu calon berasal dari etnik Bugis (Drs.Zainudin M,M). tetapi pada saat pemilihan mendapatkan suara diatas 50% dari penduduk Pohuwato. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Gorontalo sangat kondusif terhadap masalah etnisitas. Sebagaimana kita ketahui bersama, terkadang perilaku pemilih itu didasarkan dan dipengaruhi oleh etnik calon yang diusung, namun hal itu tidak menjadi indikator penentu didaerah Propinsi Gorontalo. Dengan contoh Bupati terpilih dikabupaten Pohuwato yang berasal dari etnik diluar Gorontalo, telah menunjukkan daerah Propinsi Gorontalo tingkat kesadaran politik terhitung telah baik, pemerintah daerah mampu membina masyarakatnya dari konflik yang diakibatkan oleh benturan antara etnik sebagaimana yang terjadi didaerah lain diIndonesia. Begitu pula dengan kehidupan keagamaan didaerah Gorontalo, dimana masyarakatnya sangat toleran terhadap agama yang dianut oleh etnik tertentu. Karena terkadang agama sangat sensitif menimbulkan konflik didaerah, namun berkat kesadaran semua komponen masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah yang tidak henti-hentinya membina kehidupan keagamaan didaerah telah membuat daerah Propinsi Gorontalo,

suasana stabilitas keamanannya masuk dalam salah satu daerah yang kehidupan antar etnik terbaik di Indonesia.

Interaksi Masyarakat lokal Terhadap Etnis lain yang menjadi penduduk di daerah Propinsi Gorontalo.

Kesadaran penyelenggara pemerintahan daerah terhadap konstitusi membuat masyarakat dan pemerintah daerah tidak diskriminasi atas etnis lain yang hidup dan berdomisili di daerah Gorontalo. Disamping itu etnis lain selain dari etnis Gorontalo mereka ini diberikan pengetahuan tentang tradisi masyarakat lokal, dengan tujuan etnis lain dapat berinteraksi dengan etnis lokal. Dengan strategi ini, telah meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Karena masing-masing etnik punya peranan yang sama dalam mensukseskan pembangunan di daerah. Wujudnya adalah ketika pada perayaan hari-hari besar negara, seluruh etnis dipersatukan dalam kegiatan, baik kegiatan olahraga, kesenian maupun dalam kehidupan keagamaan atau perayaan budaya dari masing-masing etnis. Interaksi yang terlihat dan telah menjadi tradisi di sebagian masyarakat yang ada di Gorontalo, adalah tradisi yang ada pada etnis Jawa, dimana dalam penyelenggaraan yang tadinya hanya bersifat rasa syukur kepada sang pencipta atas keberhasilan panen, yang diwujudkan dalam kegiatan perayaan ritual keagamaan. Namun telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat penduduk asli Gorontalo. Yang saya maksudkan adalah perayaan hari raya ketupat.

Hal ini menunjukkan antara etnis Jawa dan etnis penduduk asli telah terjalin hubungan interaksi antar etnis pendatang dan etnis Gorontalo, Sehingga etnis Jawa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo. Kemudian untuk menelusuri interaksi antar etnik lain selain etnis Jawa, kita dapat melihat di daerah Gorontalo, dimana yang menguasai perekonomian disana adalah mereka dari etnis China dan Arab. Ini dapat dilihat dari kepemilikan usaha-usaha yang dapat menggerakkan perekonomian di Gorontalo, dimana omzet dari usaha mereka ini di atas 50 juta perhari. Namun dalam kehidupan mereka selama berada di daerah Gorontalo tidak pernah diganggu oleh masyarakat lokal. Tetapi hal ini tidak permanen tergantung dari sikap etnis pendatang pada etnis lokal. Kalau hal ini tidak diperhatikan oleh masyarakat etnis China dan mereka pemilik modal, bisa saja mereka akan terusir dari daerah Gorontalo seperti yang pernah terjadi Maluku Utara. Namun semua ini belum terjadi, konflik antar etnis karena masing-masing pihak saling menghargai dan menghormati.

Secara garis besar masyarakat Gorontalo adalah masyarakat religius, dimana dengan prinsip keagamaan yang bersumber pada Adat bersendikan Syara, dan syara bersendikan Kitabullah, membuat masyarakat Gorontalo dalam kehidupan kesehariannya menyadari betapa pentingnya hidup berdampingan dengan siapapun, prinsip ini, menjadikan masyarakat Gorontalo sangat menghormati tamu, namun kalau pun etnis pendatang tidak menghargai adat dan tradisi Gorontalo, etnis tersebut akan terusir di daerah Gorontalo. Dengan demikian masyarakat Gorontalo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, sehingga itu kota Gorontalo dikenal dengan kota

serambi mekah, Hal inilah yang memperkuat harmonisasi interaksi antar etnis di Propinsi Gorontalo Sebagai perekat persaudaraan antar etnis. Dengan kesadaran seperti ini pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo khususnya memperlakukan etnis diluar etnis Gorontalo mendapatkan hak yang sama bahkan pada jabatan politik tertinggi sebagai kepala daerah tidak dipersoalkan oleh masyarakat Gorontalo.

Propinsi Gorontalo penyebaran etnis ada dibeberapa daerah khususnya berada pada kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato disanalah program pemerintah pusat melakukan transmigrasi penduduk yang berasal dari pulau Jawa. Sekarang kehidupan mereka telah bertambah populasinya dan bahkan telah terjadi perkawinan antara suku pendatang dengan penduduk asli Gorontalo. Dengan demikian hubungan interaksi etnis pendatang tidak lagi dianggap orang lain didaerah Gorontalo, namun sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Gorontalo konflik yang akan muncul pada masyarakat didaerah Gorontalo..

Interaksi antar etnis yang harmonis menjadi harapan semua negara. Setelah melihat tragedi yang terjadi di negara Balkan yang porak poranda karena etnis, hal ini harus kita hindari bersama, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperlakukan semua etnis yang ada didaerah Gorontalo secara adil dan merata dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Upaya Pemerintah Daerah Membina Harmonisasi Antar Etnik.

Data sesuai dengan fakta di mana Provinsi Gorontalo termasuk salah satu daerah yang ada di Indonesia yang menunjukkan tentang kehidupan antar etnisnya sangat harmonis. Hal inilah yang meminta kami untuk menyampaikan tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam membina kehidupan antar etnis yang ada di Provinsi Gorontalo.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal, memperlakukan semua etnis di daerah Gorontalo, sama dengan etnis lokal, selanjutnya perlakuan masyarakat Gorontalo pada etnis lain diluar Gorontalo adalah melibatkan mereka dalam semua aktivitas, misalnya setiap tanggal 17 Agustus dilaksanakan perayaan olahraga dan kesenian, seluruh masyarakat dilibatkan tak terkecuali etnis diluar Gorontalo. Selain itu pembinaan interaksi antar etnis dilakukan dengan melalui penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada generasi muda melalui peran karang taruna yang ada pada kecamatan dan dikelurahan, desa-desa yang ada, kegiatan seperti ini sangat efektif karena pemerintah daerah memiliki rasa tanggung jawab yang sama pada seluruh etnis yang ada didaerah Gorontalo. Dengan kegiatan seperti itu seluruh komponen masyarakat Gorontalo merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian hal itu akan membuat kehidupan antar etnis didaerah Gorontalo semakin harmonis.

Hubungan pembinaan etnisitas didaerah Gorontalo dengan Ketahanan Nasional.

Pemerintahan daerah merupakan perpanjangan pemerintahan pusat yang ada didaerah, dimana pemerintahan daerah adalah bagian dari pelaksanaan organisasi negara dalam hal melaksanakan fungsi pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi adalah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Termasuk dalam hal stabilitas didaerahnya. Oleh karenanya salah satu sumber konflik dinegara-negara didunia adalah pembinaan etnis yang ada dinegaranya. Karena terkadang kebijakan negara yang tidak didasarkan pada etnis yang ada akan mengakibatkan negara hancur sebagaimana yang terjadi di negara-negara besar seperti Unisoviet, dan Negara Yugoslavia (Balkan).

Persoalan etnis kalau tidak dicermati dengan baik, akan menjadi penghambat dalam melaksanakan pembangunan didalam negeri khususnya diIndonesia, pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat untuk menjawab tuntutan pemerintah daerah yang menghendaki adanya sistem desentralisasi kekuasaan, dimana daerah meminta sebagian kewenangan dan potensi pendapatan Asli daerahnya dikelola oleh daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberdayakan dan menyemarakkan seluruh komponen yang ada didaerahnya, terutama daerah harus memiliki kemampuan membina etnis yang ada didaerahnya dengan menjaga budaya dan tradisi dari etnis yang ada didaerahnya, serta memberikan tempat yang sama pada etnis diluar daerahnya untuk diberlakukan sama dengan penduduk lokal. Dengan menyadari hal itu, maka konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harusnya berwawasan nusantara artinya konsep ini mewajibkan kepada kita terutama pemerintah daerah agar supaya untuk bersikap adil dan bijaksana terhadap etnis yang ada diadaerahnya. Pembinaan etnisitas harus menjadi perhatian pemerintah Daerah untuk dapat menghindari perilaku etnosentrisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan dapat mengancam stabilitas daerah. Dengan kesadaran membangun dengan konsep wawasan nusantara, mudah-mudahan propinsi Gorontalo akan mampu membina kehidupan harmonisasi antar etnis didaerahnya.

Hubungan ketahanan nasional dengan pembinaan etnisitas didaerah adalah masalah etnisitas menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah pusat dimana salah satu tujuan pembinaan stbilitas nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh interaksi antar etnis yang sama-sama diharapkan etnis yang ada diIndonesia berjumlah 1072 etnis memiliki interaksi yang positif diIndonesia, ketika terjadi problem antar etnis didaerah, secara langsung akan mengancam stabilitas Negara ini. oleh karenanya pemerintah pusat mengharapakan kepada pemerintah daerah untuk dapat membina keharmonisan antar etns didaerah masing-masing.

Permasalahan etnis merupakan suatu masalah nasional, dimana kalau pembinaan etnis tidak mampu menumbuhkan rasa kebangsaan kepada etnis disemua daerah, akan mengancam integritas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karenanya pembinaan etnis harus menjadi perhatian oleh semua komponen bangsa ini sehingga tidak menjadi ancaman bagi Negara kita. Caranya adalah dengan menanamkan rasa kebangsaan dan memberikan pemahaman Pancasila sebagai dasar Negara dan konstitusi pada generasi antar etnis yang ada di daerah.

Permasalahan yang timbul di daerah yang merusak stabilitas daerah dan mengancam stabilitas nasional seperti : *Pertama*, Budaya politik etnis dalam pemilihan kepala Daerah. *Kedua*, Mental pejabat birokrasi yang mengedepankan jiwa etnosentrisme pada etnis lain. *Ketiga*, Kurangnya Pemahaman Pancasila dan konstitusi terhadap hak-hak bernegara. *Keempat*, Budaya kompetisi tidak sehat. *Kelima*, Kesadaran dari etnis lain terhadap kebudayaan lokal. *Keenam*, Etnis pendatang tidak mampu melakukan asimilasi dan akulturasi di daerah yang dia tempati.

Berdasarkan identifikasi yang menyebabkan kehidupan harmonisasi antar etnis di daerah tidak terjalin baik dimana faktor penyebabnya sebagaimana yang disebutkan di atas sbb : *Pertama*, Budaya politik etnis dalam pemilihan kepala Daerah. *Kedua*, Mental pejabat birokrasi yang mengedepankan jiwa etnosentrisme pada etnis lain. *Ketiga*, Kurangnya Pemahaman Pancasila dan konstitusi terhadap hak-hak bernegara. *Keempat*, Budaya kompetisi tidak sehat. *Kelima*, Kesadaran dari etnis lain terhadap kebudayaan lokal. *Keenam*, Etnis pendatang tidak mampu melakukan asimilasi dan akulturasi di daerah yang dia tempati.

Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita terhadap permasalahan tentang Upaya pemerintah Daerah dalam membina Harmonisasi kehidupan antar etnik di Propinsi Gorontalo sbb :

- 1). Pengertian etnisitas adalah sebagai suatu komunitas antropologis yang didasarkan pada hubungan genealogis serta kultural yang menempati daerah atau wilayah tertentu telah membentuk komunitas yang secara homogen hanya terdiri dari satu komunitas.
- 2). Ide multikulturalisme pada dasarnya adalah gagasan mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan dengan keragaman itu sendiri (*politics of recognition*).
- 3). Etnosentrisme adalah kebijakan yang didasarkan pada etnis tertentu untuk menduduki jabatan, baik itu jabatan struktural, jabatan politik dan pekerjaan (PNS) sebagai alasan pengambilan kebijakan pemerintah daerah maupun swasta.
- 4). Jumlah etnis yang ada di daerah Propinsi Gorontalo berdasarkan sensus tahun 2000 berjumlah 15 etnis yang ada, dimana apabila kita urutkan lima besar dari jumlah etnis yang ada dapat disebutkan lima besar etnis yang terbanyak, dimana pada urutan pertama etnis Gorontalo dengan jumlah penduduknya sebesar 750.541 atau 90,43%, urutan *kedua* terbanyak berasal dari etnis lainnya (34.329 atau 4,114 %) yang dalam kehidupan masyarakat Gorontalo mereka ini terdiri dari etnis yang

berasal dari luar negara kita setelah melakukan migrasi dari negaranya atau melalui perkawinan dan hubungan perdagangan, urutan *ketiga* adalah berasal dari etnis Jawa berjumlah 20.427 atau 2,46%, urutan keempat berasal dari etnis Sangir berjumlah penduduknya 5.999 atau 0,72% dan urutan *kelima* adalah etnis minahasa jumlah penduduknya 4.489 atau 0,54%. Dan etnis lainnya yang jumlah penduduknya dibawah 4.000 yang terdiri dari etnis Bajo jumlah penduduknya 3.172 atau 0,38%, Gebe-Gebi 2.903 atau 0,35 %, etnis Bugis 2.442 atau 0,29, Sunda jumlah penduduknya 792 atau 0,10, Minangkabau 60 atau 0,01, etnis Madura berjumlah 48 atau 0,01, etnis Banjar jumlah 35 atau 0,00, etnis Betawi 22 atau 0,00, dan etnis Banten jumlah 8 orang atau 0,00.

- 5). Interaksi masyarakat lokal terhadap etnik diluar etnis Gorontalo terlihat dilapangan /didaerah semakin memasyarakat dan telah menjadi hubungan kekeluargaan dengan etnis lokal. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar etnis didaerah Gorontalo sangat kondusif. Seperti terlihat pada posisi jabatan politik sebagai kepala daerah yang memimpin di daerah tingkat I dan tingkat II adalah etnis etnis lain diluar etnis Gorontalo, misalnya Gubernur dan kepala daerah Kabupaten Pohuwato. Lagi pula sekarang ini untuk mencari etnis asli Gorontalo sudah semakin sulit, karena sekarang ini telah terjadi akulturasi lewat perkawinan. Hal ini akan memunculkan etnis baru dari keturunannya sebagai etnis campuran.
- 6).Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina harmonisasi kehidupan antar etnis didaerah Propinsi Gorontalo adalah terkadang dilakukan melalui kegiatan Olahraga dan kesenian, dimana pada saat perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, pemerintah daerah melaksanakan turnamen olahraga yang bertujuan membina persahabatan dan persaudaraan antar etnis yang telah diakui sebagai warga masyarakat Gorontalo. Selanjutnya upaya pembauran terjadi pada kegiatan ritual dari etnis lain, misalnya untuk etnis Jawa sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat Gorontalo bersama-sama merayakan dengan etnis jawa pada perayaan keagamaan. Makna dari semua itu adalah kehidupan antar etnik didaerah Gorontalo telah terjalin dan hubungannya sangat harmonis.
- 7). Hubungan pembinaan harmonisasi antar etnis didaerah sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional dan ketahanan bangsa, karena apabila kehidupan etnis mengalami konflik didaerah akan mempengaruhi pembangunan didaerah dan secara tidak langsung berpengaruh pada ketahanan nasional. Dimana ketahanan nasional dapat terwujud apabila ketahanan daerah dapat terjalin dengan baik.

S a r a n

Kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terhadap Upaya pemerintah dalam membina Harmonisasi kehidupan antar etnis diPropinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan program pembangunan tidaklah didasarkan pada konsep etnosentrisme, artinya pembangunan yang hanya menonjolkan etnis tertentu didaerahnya, misalnya dalam melakukan rekrutmen

- jabatan apapun atau pengangkatan PNS tidak didasarkan pada konsep etnosentrisme, karena daerah Gorontalo adalah milik semua komponen masyarakat yang ada di daerah tersebut.
2. Multikulturalisme harusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah supaya tidak menjadi persoalan di daerah, karena keputusan yang tidak memperhatikan kelompok minoritas di daerah dapat membuat peta konflik di daerah.
 3. Pemerintah daerah memperlakukan etnis yang ada di daerahnya sama dengan etnis lokal yang menikmati hak-hak politik, hak ekonomi, hak sosial.
 4. Pemerintah daerah harus melakukan program-program pembangunan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sikap pemerintah daerah harus adil dan bijaksana dalam hal-hal yang menyangkut pembangunan kesejahteraan.
 5. Pemerintah Daerah harus memelihara interaksi yang sudah terbangun antar etnis sekarang ini yang dinilai sangat kondusif, artinya harapan kami kepada pemerintah daerah untuk lebih giat lagi melakukan pembinaan kepada generasi muda untuk saling menjaga dan menghargai antar sesama etnis yang ada.
 6. Pemerintah Daerah Gorontalo harus lebih banyak melakukan kegiatan olahraga dan kesenian dijadikan sebagai program di daerah dalam hal pembinaan kerukunan antar etnis yang ada di Gorontalo.
- Pemerintah daerah hendaknya memperlakukan seluruh komponen masyarakatnya di daerah dengan adil dan merata, terutama pada hak-hak yang menyangkut hak hidup sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 .

D A F T A R P U S T A K A

- Bahar, Saproedin, 2007” *Diktat Posisi Etnisitas Dalam Proses Integrasi Nasional, Ancaman Gagal Negara, dan pembinaan ketahanan Nasional Indonesia.*
- Beilharz, Peter , 2002 “ *Teori-Teori Sosial*” Penerbit Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin, 2005” *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan daerah* “ Penerbit LIPI PRESS.
- Hidayah, Zulyani ,1997” *Ensiklopedi, suku bangsa di Indonesia*” Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Anggota IKAPI
- Karim, Gaffar, Abdul, 2006” *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah Di Indonesia*” Penerbit Pustaka Pelajar.

Mohammad, Fadel, 2007 *“Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah”*. Penerbit Gajah Mada University Press

Pruitt.G.Dean ,2004 ” *Teori Konflik Sosial* “ Pustaka Pelajar

Suryadinata, leo ,2003 *“Penduduk Indonesia , Etnisitas dan Agama dalam perubahan politik*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Anggota IKAPI